

Nataru, Militan Sopan

NATARU atau singkatan Natal dan tahun, baru adalah iven yang sudah menjadi realitas dunia. Natal bagi umat Kristiani jelas beda dengan umat Islam. Dalam menjaga kemajemukan dan sunah kehidupan tentu umat non-Kristiani akan bertoleransi, memberikan kesempatan pada saudaranya merayakan Natal.



Duski Samad
Ketua Dewan Masjid
Indonesia (DMI) Sumbar

Dalam menyikapi iven nataru di era digital, medsos, viral, *nitizen* dan *trending* topik yang sepertinya sudah menjadi referensi dalam menentukan kebijakan dan penilaian publik, maka patut ditegaskan opini publik yang lemah akurasi ini tidak boleh mengeser iman dan distingsi antar iman. Suara *nitizen* diminta tidak boleh mengaburkan batas iman dan kafir, tidak boleh pula menabrak prinsip iman umat

non-Kristiani terhadap ibadah Natal-nya Kristiani. Relasi beda iman dalam pluralitas tidak boleh saling menafikan. Natal ibadah bagi umat Kristiani, tidak boleh (haram) hukumnya dilakukan umat Islam. Sebaliknya, tercela jadinya bila umat non-Islam ikut pula ibadah Idul Fitri atau ibadah umat Islam yang lain.

► Baca *Nataru...* Hal 7

Nataru, Militan Sopan

Sambungan dari hal. 1

Judul militan nan sopan di atas adalah bentuk nyata relasi antar iman yang wajib hukumnya dilakukan oleh umat yang berbeda agama, tak terkecuali dalam menyambut atau menyongsong Nataru. *Nitizen*, pegiat mendos, mereka yang sok pluralis tidak perlu nyinyir memprovokasi umat Islam atau umat selain Kristiani untuk ikut merayakan Natal. Meneguhkan militansi, ideologi dan sikap keagamaan yang di-anut orang atau komunitas adalah bentuk konkret dari relasi sehat dalam kemajemukan.

Etika Keragaman
Krisis etika keragaman adalah akar masalah intoleransi yang dilabelkan terhadap jumar dan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Begitu juga stigma radikalisme, terorisme yang dilekatkan pada komunitas muslim dengan gaya berpakaian yang beda dengan yang diajarkan oleh Barat. Padahal, harusnya keteguhan sikap keagamaan komunitas adalah sset untuk majemuk.

Sungguh indah dan hebat promosi etika kemajemukan dan hidup aman, nyaman dan damai walaupun dalam lingkungan komunitas beda iman yang bukan tidak mungkin ada potensi konflik yang ditungkap Allah dalam *Al Quran*. Allah SWT telah dengan jelas mendidik umat agar meneladani politik kemajemukan dan kebangsaan yang sudah dilakukan Rasul Muhammad SAW, di antaranya dilarang atau tidak boleh menyerang musuh yang tidak mengganggu dan siapapun diminta agar lebih mengedepankan cinta kasih (*mauaddah*) dan bekerja keras untuk menegakkan keadilan. (QS 60:6-9)

Norma ajaran dan etika Islam memuat bahwa hidup dalam masyarakat majemuk adalah sesuai kehendak Allah (*Sunanullah*) dan kesempatan untuk saling mengenal, lita'arafu (QS 49:13).

Islam memberikan jaminan kepada setiap manusia memilih keyakinan hidupnya, *la ikhraha fiddin*, tidak boleh ada pemaksaan dalam beriman. (QS 2:256). Keberislaman yang tidak di dasari keimanan tidak ada nilainya (QS 49:14).

Sirah Nabawiyah menjadi fakta empiris dan bukti pengalaman (*best practice*) bahwa umat Islam generasi awal di Kota Madinah hidup dalam bangsa majemuk. Ada puluhan kelompok, etnis, agama dan kepercayaan yang dapat hidup damai dan nyaman di bawah kesepakatan bersama al Misaq Al Madinah (Konstitusi Madinah). Bahkan ada kisah hebat tentang toleransi (*tasamuh*) dalam haf kegiatan yang

berhubungan ibadah, atau sekedar sarana ibadah. Dalam Sirah Nabawiyah, ditulis saat Nabi menerima kunjungan pendeta Nasrani Najran, selesai percakapan sang pendeta minta izin keluar untuk ibadah, nabi tidakizinkan bahkan nabi mempersilakan mereka ibadah di Masjid Nabawi itu. Pesan kisah ini berarti jika umat Islam beribadah sebatas tempat dan tidak ada percampuran ibadah adalah boleh, karena itu bagian dari keharusan dalam masyarakat majemuk.

Nash Al Quran, hadis dan *atsar* sahabat memberikan dukungan dan promosi jelas tentang keniscayaan toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Manusia itu mulia dan wajib dimuliakan, termasuk dalam berkeyakinan adalah perintah Allah SWT (QS 17:70). Keragaman (pluralitas) iman itu adalah kehendakNya jua, jika Allah mau membuat keseragaman itu bisa adanya, realitasnya ada keragaman (QS 10:99). Tugas menyatakan kesatuan tauhid dan dakwah kebenaran adalah wajib namun ada yang iman dan kafir itu kehendak Allah juga. (QS 18:29). Bahwa ada kompetisi dalam meraih kebaikan adalah niscaya, tidak pula harus memaksakan keunggulan (QS 5:48). *Sunanullah* adanya keragaman tidak pernah berhenti. (QS 33:62). Perbedaan bahasa, warna kulit adalah ayat Allah menjadi media ilmi (QS 30:22). Mencari persamaan dan titik temu adalah keharusan untuk menjamin adanya keragaman (QS 34:24-6).

Motif dan Momen

Sepanjang sejarah RI pada dasarnya harmoni dan rukun antar beda iman sudah berjalan efektif dan telah menjadi fakta budaya yang tak sulit menunjukkannya. Berhadapan hadapan bangunan rumah ibadah antar beda agama, rumah ibadah minoritas berdiri teguh di pusat perbelanjaan dan jalan utama di tengah komunitas agama yang berbeda adalah fakta sosiologis bahwa harmoni dan rukun itu menaja di darah daging bangsa.

Di era demokratisasi dan kebebasan ini menjadi patut diperhatikan adanya gesekan, gaduh dan bisa menjadi konflik lebih di picu adanya provokasi yang mengambil momen tertentu. Saat ada pemilihan umum, pilkada, ketika hari besar umat beragama dan iven besar yang ada kaitannya agama, ada pihak yang memboncengi dengan isu intoleransi. Pada umat Islam mayoritas seringkali akhir tahun, khususnya perayaan Natal, menjadi ajang provokasi oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan. Tahun 2019 ini terulang lagi, kasus Natal di rumah penduduk menjadi keba-

bohan di Sijunjung, viral melalui media sosial oleh seseorang yang menyebutnya Anggiat.

Kasat mata bahwa informasi provokasi melalui media sosial, diyakini bagian dari penggunaan momen dengan motif disharmoni. Pemkab Sijunjung berjalan di koridor hukum yang benar, namun LSM penanggung di air keruh menjadikan momen Natal untuk motif sesuai kepentingannya.

Side Effect

Andhazar ilal matal (perkiraan yang berpotensi terjadi) adalah dasar pertimbangan hukum dan kebijakan yang diambil oleh Pemda Sijunjung tentang tidak memberi izin perayaan natal di rumah penduduk dengan mengundang jemaat lain. Bupati dalam menentukan pilihan sikap sejalan dengan konsepsi kerukunan menurut Mukti Ali, mencontohkan cara membangun kerukunan, jangan menanam sayur di kebun orang.

Prinsipnya ibadah umat beragama dijamin oleh negara pasal 29 ayat 2, akan tetapi juga harus diperhatikan pasal 28 J UUD 1945, bahwa setiap orang punya kebebasan, tetapi kebebasan dapat dibatasi untuk menghormati kebebasan orang lain.

Di dua kabupaten itu tidak ada rumah ibadah, lalu umat Kristiani melakukan natal di rumah yang tidak peruntukan bagi ibadah itu menimbulkan gangguan kerukunan masyarakat lokal. Maka pasal 28 J menjadi dasar hukum oleh Pemda Sijunjung melarang Natal untuk menjaga kerukunan. Ini masalahnya bukan pelanggaran Natal atau ibadah bagi umat Kristiani, akan tetapi pemda menegakkan peraturan tentang ketenteraman agar beribadahnya di rumah ibadah. Boleh di rumah tentu untuk penghuni rumah itu sendiri, bukan mengundang jamaah lainnya, yang dipastikan menimbulkan ketidaknyamanan bagi lingkungan.

Efek yang patut diperhatikan bahwa konsep kesetaraan dan jaminan dalam ibadah tentu harusnya secara proporsional, tidak boleh ada dominasi mayoritas, dan lebih tidak boleh lagi dominasi minoritas, begitu tirani minoritas, maka perlu rambu aturan dan teladan dari perilaku pemimpin.

Penutup

Menjaga keragaman yang dinamis, umat beda iman harus meneguhkan militansi umat masing-masing, dengan tetap menjaga kesantunan sosial. Teladan Rasul cukup sudah, wahyu sudah memberikan kepastian militansi umat harus ditegakkan melalui akhlak mulia, operasionalnya dapat dipahami pada surat ke-9 dan ke-60. Nataru, Militan